

BAB V

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil analisis data dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem Insentif tidak berpengaruh terhadap Efektivitas Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun dengan nilai signifikansi sebesar 0,861.
2. Sistem Insentif Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Efektivitas Kinerja Pajak Hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun dengan nilai signifikansi sebesar 0,027.
3. Sistem Insentif Pajak Reklame tidak berpengaruh terhadap Efektivitas Kinerja Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun dengan nilai signifikansi sebesar 0,597.
4. Data Kuesioner hasilnya terdapat pengaruh sistem insentif terhadap efektivitas kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun.

B. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki kekurangan-kekurangan dan keterbatasan-keterbatasan antara lain:

1. Penelitian ini hanya menguji satu variabel independen saja yaitu sistem insentif yang meliputi sistem insentif Pajak Hotel dan Restoran, sistem insentif Pajak Hiburan, sistem insentif Pajak Reklame, sistem insentif Pajak Penerangan Jalan, sistem insentif Retribusi Ijin Mendirikan

Bangunan dan sistem insentif Retribusi Ijin Trayek, kemungkinan adanya variabel lain yang lebih signifikan belum diuji dalam penelitian ini.

2. Penetapan sampel terbatas pada enam jenis PAD dan data runtut waktu terbatas hanya enam tahun saja.
3. Penelitian ini hanya menguji data kuantitatif yang diperoleh dari laporan realisasi penerimaan dan pendapatan daerah Kota Madiun.

C. Saran

Dari hasil dan keterbatasan-keterbatasan, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Penelitian Mendatang.
 - a. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel independen lain yang lebih signifikan yang belum diuji dalam penelitian ini. Contohnya variabel kompensasi.
 - b. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan penetapan sampel tidak terbatas pada enam jenis PAD saja misalnya menambah jenis variabel Bagi Hasil Pajak dan data runtut waktu lebih dari enam tahun.
 - c. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menguji data kualitatif sehingga hasilnya dapat dibandingkan dengan data kuantitatif.
2. Bagi Pemerintah Daerah adalah perlunya mengubah prosentase pemberian insentif. Insentif kepada aparat pelaksana pemungutan hendaknya diberikan berdasarkan kinerja yang dicapai yaitu perbandingan antara realisasi dan target masing-masing jenis PAD.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Salemba Empat
- Devas, Nick. 1981. *Keuangan Pemerintah di Indonesia*. Jakarta. UI Press
- Firma Sulistiyowati. 2005. " Pengaruh Penghasilan Terhadap Efektivitas Kinerja Kepala Perangkat Daerah". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*. 27-54
- Hansen Don dan Mowen MM. 1999. *Akuntansi Manajemen I*. Jakarta. Erlangga.
- Imam Ghozali. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi 3. Semarang. BP-UNDIP
- Mohamad Mahsun., Firma Sulistiyowati., Heribertus A.P. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. BPFE
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta. BPFE
- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1981 tentang *Pemberian Upah Jasa Pungut kepada Aparat Penghasil Pendapatan Daerah Kotamadya Tingkat II Madiun*
- Peraturan Daerah Nomor 65 Tahun 2001 tentang *Pajak Daerah*. www.google.com
- Peraturan Daerah Nomor 66 Tahun 2001 tentang *Retribusi Daerah*. www.google.com
- Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. CV Alfabeta
- Singgih Santosa. 2001. *SPSS Statistitik Non Parametrik*. Jakarta. PT Elek Media Komputindo.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. www.google.com
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang *Perubahan atas Undang-undang No.18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. www.google.com
- Y. Joni Pambelum dan Napa J. Awat. 2005. " Pengaruh Sistem Insentif Terhadap Efektivitas Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangkaraya". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik* : 130-155